

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Lembaga

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah salah satu kementerian yang memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Mengutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian, sejarah Kemenperin terbentang panjang, dimulai sejak era kemerdekaan Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, sektor industri dan perdagangan masih berada di bawah naungan Kementerian Kemakmuran. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kompleksitas tugas, pada tahun 1950, dibentuklah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

Perjalanan berlanjut pada tahun 1961, ketika Kementerian Perindustrian kemudian dipecah menjadi dua: Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Pemisahan ini dimaksudkan untuk fokus pada pengembangan industri dasar dan industri rakyat yang memiliki karakteristik berbeda.

Memasuki era Orde Baru, Deperdatam dan Depperindra kembali digabung menjadi Departemen Perindustrian pada tahun 1966. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan efisiensi dalam pengelolaan sektor industri.

Pada tahun 1993, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibentuk, menggabungkan sektor industri dan perdagangan di bawah satu atap. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara holistik.

Era Reformasi membawa perubahan kembali. Struktur Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengalami perubahan signifikan pada

tahun 1998, di mana departemen tersebut dipecah menjadi dua departemen yang berdiri sendiri.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, di tahun 2009, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian. Transformasi ini menandakan peningkatan peran dan tanggung jawab Kemenperin dalam memajukan sektor industri nasional.

Kemenperin telah mengalami berbagai transformasi dan perkembangan selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenperin selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan terus berupaya untuk meningkatkan perannya dalam mendorong kemajuan industri nasional.

Kementerian Perindustrian terus berperan dalam mengembangkan industri nasional, menjaga daya saing di pasar internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Visi dan misi kementerian tersebut diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga saat penulis menyusun laporan ini, Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita.

2.1.1 Logo Lembaga

Di bawah ini merupakan logo dari Kementerian Perindustrian seperti yang tertera pada situs resmi mereka.



Gambar 2.1 Logo Kementerian Perindustrian

Sumber: <https://www.kemenperin.go.id/>

A. Makna Logo Kementerian Perindustrian

Mengutip situs resmi Kementerian Perindustrian, logo di atas terinspirasi dari stilasi daun, menyatukan komponen elektronik tanpa kabel dengan pola sirkuit yang menyerupai struktur daun. Lima roda gigi yang terdapat dalam logogram tersebut melambangkan lima asas negara Indonesia serta lima nilai inti Kementerian Perindustrian, yakni Integritas, Profesionalisme, Inovatif, Produktif, dan Kompetitif.

Lebih lanjut, Kemenperin diharapkan dapat memainkan peran vital dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan peluang kerja, memperkuat daya saing industri, memprioritaskan kelestarian lingkungan, dan memacu inovasi dalam pengembangan industri nasional.

Huruf tebal dan dinamis yang digunakan pada logo Kementerian Perindustrian melambangkan kekuatan dan semangat modern kementerian, yang merangkul seluruh komunitas industri. Warna biru pada tulisan "Kementerian Perindustrian" merepresentasikan pentingnya teknologi dalam memajukan industri nasional.

B. Makna Warna Logo Kementerian Perindustrian

- Warna Merah Oranye mewakili: Dinamis dan kebijaksanaan
- Warna Hijau mewakili: Pertumbuhan, kesejahteraan, dan kesadaran lingkungan.
- Warna Biru mewakili: Keyakinan diri, kemandirian, dan teknologi.
- Warna Abu-abu mewakili: Sikap optimis dan efektif.

2.1.2 Visi Lembaga

Situs resmi Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan:

- 1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
- 2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
- 3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

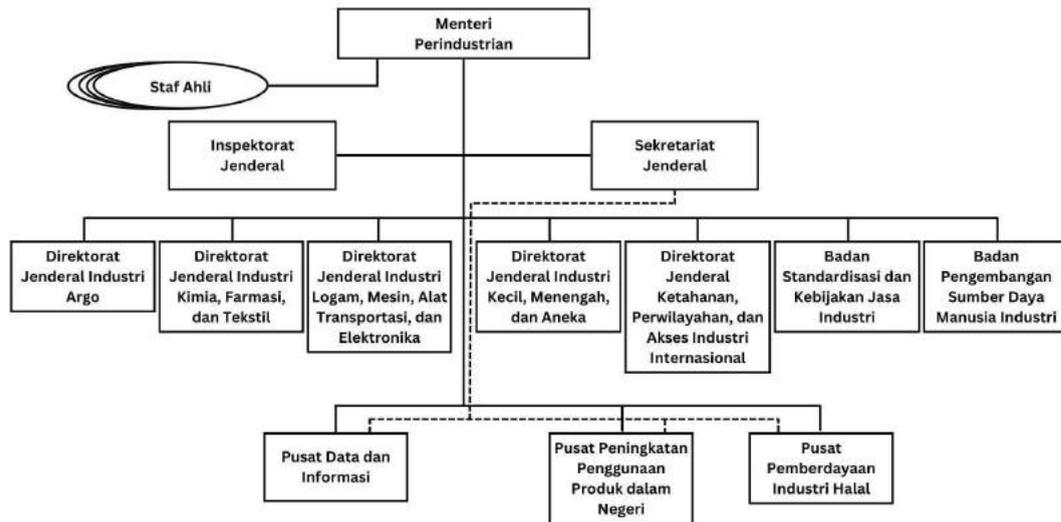
2.1.3 Misi Lembaga

Misi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dikutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
- 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
- 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2.2 Struktur Lembaga

Berikut merupakan gambaran umum struktur Kementerian Perindustrian sesuai dengan Permenperin Nomor 8 Tahun 2023.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Sumber: Permenperin Nomor 8 Tahun 2023

2.2.1 Kedudukan Humas di Kementerian Perindustrian

Sesuai dengan Permenperin Nomor 8 Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bernaung di bawah Sekretariat Jenderal seperti pada **Gambar 2.3**, dikepalai oleh seorang Kepala Biro Humas dan terbagi menjadi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab atas perencanaan, program, anggaran, keuangan, SDM, struktur organisasi, administrasi umum, manajemen aset, komunikasi tertulis, arsip, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan biro.



Gambar 2.3 Kedudukan Hubungan Masyarakat Kemenperin

Sumber: Permenperin Nomor 8 Tahun 2023

Namun, dalam rangka melaksanakan transformasi sistem kerja yang memiliki orientasi pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan penyempurnaan pelayanan publik, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat, maka dinilai perlu membentuk beberapa Tim Kerja dalam lingkungan Biro Hubungan Masyarakat seperti pada uraian berikut.



Gambar 2.4 Struktur Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin

Sumber: Data Internal Lembaga (2024)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Humas Kemenperin Nomor 121 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Tugas dan Fungsi di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian, dibentuklah sepuluh tim kerja seperti pada **Gambar 2.4**. Tim kerja tersebut terdiri atas ketua dan anggota dengan uraian tugas sebagai berikut.

Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Pemerintah memiliki tugas:

- membangun jejaring dengan K/L/Pemda dan MD3,
- fasilitasi hubungan kementerian dengan K/L/Pemda dan MD3, serta
- menyelenggarakan, koordinasi kegiatan kehumasan dengan Bakohumas dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Tim Kerja Hubungan Kelembagaan Non Pemerintah memiliki tugas:

- membangun komunikasi, informasi, kemitraan dan kerjasama dengan asosiasi, industri, dunia usaha, akademisi dan NGO, serta
- fasilitasi hubungan kementerian dengan asosiasi, industri, dunia usaha, akademisi dan NGO.

Tim Kerja Strategi Komunikasi dan Media Monitoring memiliki tugas:

- menyusun *agenda setting* mingguan, bulanan, dan tahunan,
- menyiapkan ide dan konten kreatif,
- melakukan *monitoring*, analisis pemberitaan, serta
- melakukan evaluasi pelaksanaan rekomendasi strakom.

Tim Kerja Liputan dan Hubungan Media memiliki tugas:

- penerbitan siaran pers,
- membangun jejaring dengan wartawan dan media massa,
- tim liputan kegiatan Menteri Perindustrian (foto dan video),
- produksi video liputan kegiatan pimpinan, serta
- *tapping video*.

Tim Kerja Konten dan Media Internal memiliki tugas:

- produksi konten kreatif (videografis) untuk YouTube dan Videotron,
- pembuatan konten kreatif video panjang (*talkshow*, KSI, *webseries*, dll),
- mengelola media promosi (videotron, TV Lobby, TV Ruang Kolaborasi, Poster, dll),
- *live streaming* YouTube, serta
- *operator Zoom Meeting* (*event khusus*).

Tim Kerja Promosi dan Publikasi memiliki tugas:

- membangun kerjasama dengan media,
- pembuatan majalah internal,
- melakukan publikasi di media massa, serta
- koordinasi Pameran dalam Negeri.

Tim Kerja Pengelolaan Media Sosial memiliki tugas:

- pengelolaan konten kreatif media sosial Kementerian Perindustrian (IG, X, Facebook, TikTok),
- liputan kegiatan pimpinan untuk konten media sosial, serta
- pengelolaan *website*.

Tim Kerja Informasi dan Pelayanan Publik memiliki tugas:

- pengelolaan pelayanan informasi publik (PPID),
- menyusun daftar informasi publik,
- menyusun daftar informasi publik dikecualikan,
- menyusun SOP layanan informasi publik,
- menyusun Juknis layanan informasi publik,
- menyelenggarakan forum konsultasi publik,
- melakukan survei kepuasan masyarakat, serta
- pengelolaan layanan publik Kementerian Perindustrian (UPP)

Tim Kerja Pengembangan SDM Kehumasan memiliki tugas:

- menjalin hubungan dengan pengelola kehumasan di Kemenperin,
- pengembangan SDM pengelola kehumasan di Kemenperin, serta
- Sekretariat JF Pranata Humas.

Tim Kerja Tata Usaha memiliki tugas:

- melaksanakan urusan rencana, program, evaluasi, pelaporan, dan anggaran,
- melaksanakan urusan keuangan,
- melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana,
- pengelolaan barang milik negara,
- pengelolaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, serta
- pelaksanaan manajemen kinerja di Biro Hubungan Masyarakat.

Selama pelaksanaan praktik kerja magang, penulis ditempatkan di bawah tim kerja Tata Usaha dengan tugas pokok sesuai pada poin ”melaksanakan urusan perencanaan, program, evaluasi, pelaporan, dan anggaran”, di mana penulis lebih difokuskan pada penyusunan perencanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat.